

DAMPAK PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO PERKAPITA DAN JUMLAH WISATAWAN TERHADAP PAJAK HOTEL DAN RESTORAN DI KOTA SAMARINDA

Agus Junaidi¹

¹Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Mulawarman, Samarinda, agus.junaidi@feb.unmul.ac.id

ABSTRAK:

Upaya peningkatan pendapatan asli daerah harus tetap dilakukan secara terintegrasi dan terkoordinasi dari keseluruhan sistem penerimaan daerah. Hal ini dilakukan agar upaya tersebut dapat dilakukan secara efektif, untuk dapat menemukan sumber penerimaan Pajak Hotel dan Restoran (PHR) yang diharapkan selalu meningkat dari tahun ke tahun. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Per Kapita dan Jumlah Wisatawan terhadap Pajak Hotel dan Restoran di Kota Samarinda. Alat analisis adalah regresi liner berganda. Hasil penelitian menemukan bahwa variabel PDRB Per Kapita (X1) berpengaruh positif dan signifikan terhadap pajak hotel dan restoran di Samarinda (Y). Sedangkan untuk variabel Jumlah Wisatawan (X2) berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap pajak hotel dan restoran di Samarinda (Y). Ini menandakan jumlah wisatawan yang berkunjung di Kota Samarinda tidak meningkatkan pendapatan pajak hotel dan restoran.

Kata Kunci: PDRB Perkapita, Wisatawan, Pajak Hotel dan Restoran, dan Kota Samarinda

ABSTRACT:

Efforts to increase local revenues should be regular and integrated and coordinated the reception area of the whole system. This is done so that these efforts can be done effectively, to be able to find a source of tax revenue of Hotels and Restaurants (PHR) expected is increasing from year to year. This study aims to determine the effect of Gross Regional Domestic Product (GDP) per capita and the number of tourists to the tax on hotel and restaurant in the city of Samarinda. Tool used multiple linear regression analysis. The study found that the variables of the GDP Per Capita (X1) positive and significant impact on the hotel and restaurant tax in Samarinda (Y). As for the variable number of tourists (X2) and no significant positive effect on the hotel and restaurant tax in Samarinda (Y). It signifies the number of tourists who visit the city of Samarinda not increase tax revenue for hotels and restaurants.

Keywords: The GDP per capita, Tourist, Hotel and Restaurant Tax, and Samarinda

PENDAHULUAN

Pembangunan daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional mengupayakan optimalisasi pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya potensial lainnya, oleh karena itu selain sumber daya manusia dan faktor-faktor lain yang sangat menentukan keberhasilan pembangunan daerah adalah tersedianya keuangan yang memadai, baik yang bersumber dari dana alokasi umum, alokasi khusus, dana perimbangan pemerintah pusat maupun dari dana yang digali dari sumber pendapatan asli daerah itu sendiri seperti pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah maupun lain-lain pendapatan yang sah. Dalam upaya pemerintah melaksanakan pembangunan, baik fisik maupun mental spiritual, masalah

daerah adalah masalah yang penting dan sangat menentukan, meskipun pemerintah mempunyai semangat yang tinggi dalam melaksanakan pembangunan namun pada akhirnya harus dibarengi dengan biaya atau dana yang cukup, bila ini tidak seimbang maka pelaksanaan pembangunan tidak akan berjalan sebagaimana seperti yang diharapkan. Dengan kata lain pemerintah harus berupaya semaksimal mungkin untuk mendapatkan dana sebanyak-banyaknya baik yang bersumber dari pusat maupun dengan cara menggali sumber-sumber dana daerah dengan pengelolaan keuangan yang efektif dan efisien dalam pembiayaan pelaksanaan pembangunan.

Sejalan dengan itu dalam rangka menyelenggarakan otonomi daerah dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya, nyata dan bertanggung jawab berdasarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah di Daerah dengan titik berat penyerahan urusan sebagian pemerintah pusat kepada Daerah / Kabupaten. Salah satu akibat yang dimiliki oleh suatu daerah untuk disebut sebagai Daerah otonomi adalah mempunyai sumber keuangan sendiri yang menghasilkan pendapatan yang cukup tinggi bagi daerah, agar dapat membiayai segala kegiatan dalam rangka menjalankan urusan rumah tangga daerahnya. Hal ini sejalan dengan pendapat Wijaya (1992:32) yang mengemukakan bahwa salah satu variabel kemampuan daerah dalam otonomi adalah kemampuan keuangan daerah, yaitu seberapa besar Pendapatan Asli Daerahnya (PAD) terhadap jumlah/total pembiayaan daerah.

Untuk lebih memperkuat upaya peningkatan penerimaan pemerintah kota/kabupaten dan mendukung perkembangan otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab dengan titik berat pada pemerintah kota / kabupaten. Salah satu jenis pajak daerah yang pengelolaannya diberikan pada pemerintah kota / kabupaten serta kontribusi yang cukup potensial baik terhadap pajak daerah maupun Pendapatan Asli Daerah adalah Pajak Hotel dan Restoran, dimana pajak ini dimasa-masa yang akan datang diharapkan kontribusinya akan lebih meningkat seiring dengan perkembangan pembangunan di daerah, sehingga Pajak Hotel dan Restoran dapat dijadikan salah satu sumber penerimaan daerah yang potensial dalam usaha pembiayaan belanja daerah untuk terjadinya akselerasi laju pertumbuhan ekonomi suatu daerah.

Upaya peningkatan pendapatan asli daerah harus tetap dilakukan secara terintegrasi dan terkoordinasi dari keseluruhan sistem penerimaan daerah. Hal ini dilakukan agar upaya tersebut dapat dilakukan secara efektif, untuk dapat menemukan sumber penerimaan Pajak Hotel dan Restoran (PHR) yang diharapkan selalu meningkat dari tahun ke tahun. Dan ini merupakan sumber penerimaan yang potensial serta kontribusinya terhadap pajak daerah dan Pendapatan Asli Daerah peranannya sangatlah berarti. Dalam upaya melaksanakan otonomi daerah maka diperlukan kesiapan daerah melalui peningkatan PAD dengan mengoptimalkan penerimaan Pajak Hotel dan Restoran (PHR) agar dapat meningkatkan kemandirian dan kemampuan keuangan daerah. Besar kecilnya penerimaan Pajak Hotel dan Restoran (PHR) dipengaruhi oleh berbagai macam variabel, diantaranya adalah investasi Swasta, Pengeluaran Pemerintah dan pendapatan perkapita serta jumlah wisatawan baik dari dalam negeri maupun mancanegara.

Pembangunan ekonomi yang berhasil akan memberikan dampak kepada meningkatnya kesejahteraan masyarakat yang hal ini ditandai dengan meningkatnya pendapatan masyarakat sehingga meningkatnya pula pola konsumsinya dan daya beli akan barang dan jasa juga akan meningkat. Dengan kata lain pembangunan ekonomi tadi akan mempengaruhi pola konsumsi, khususnya konsumsi jasa dan pola makan,

sehingga akan meningkatkan pelayanan jasa hotel dan restoran dan pada gilirannya akan meningkatkan penerimaan Pajak Hotel dan Restoran (PHR).

Alokasi dana pembangunan untuk sektor pariwisata yang merupakan kebijakan fiskal daerah akan mendorong investasi di bidang pelayanan dan pembangunan fisik hotel di Kota Samarinda, karena investasi ditunjukkan untuk membangun sarana dan prasarana yang dibutuhkan bagi pengembangan sektor pariwisata, serta pembangunan pengembangan dan pemeliharaan jalan-jalan, jembatan, fasilitas-fasilitas rekreasi, terutama rekreasi alam, budaya dan lain-lain yang diharapkan akan menarik wisatawan lokal maupun mancanegara untuk berkunjung ke Kota Samarinda. Hal ini sudah tentu akan menarik pihak swasta yang bergerak di bidang hotel untuk menyediakan pelayanan yang optimal.

Upaya Pemerintah Daerah untuk mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan daerah yang dimiliki dalam otonomi daerah terus dilakukan. Optimalisasi sumber pendapatan daerah terutama melalui upaya peningkatan kapasitas fiskal (*fiscal capacity*) dan menutup defisit fiskal yang banyak dialami oleh Pemerintah Daerah. Peningkatan penerimaan daerah ini tidak selalu identik dengan peningkatan tarif pajak dan retribusi. Demikian pula dengan kebutuhan daerah untuk meningkatkan penerimaan daerah dalam otonomi tidak selalu diikuti oleh kenaikan tingkat tarif pajak dan tarif retribusi. Salah satu optimalisasi penerimaan daerah, Pemerintah Daerah telah membentuk berbagai PERDA (Peraturan Daerah) yang bertujuan untuk memperbaiki sistem perpajakan daerah. Pembaruan peraturan dan perundangan perpajakan mempunyai makna strategis bagi pemerintah daerah, sebagai pilihan untuk meningkatkan pendapatan pajak daerah. Sejak diberlakukannya otonomi daerah, banyak kecemasan yang muncul akibat adanya usaha pemerintah daerah untuk meningkatkan PAD setinggi-tingginya tanpa mempertimbangkan efek negatif yang ditimbulkan bagi masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik melakukan penelitian untuk mengetahui Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Per Kapita dan Jumlah Wisatawan terhadap Pajak Hotel dan Restoran di Kota Samarinda.

TINJAUAN LITERATUR

Keuangan Daerah

Di dalam memahami keuangan daerah tidak terlepas dari pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang ada hakekatnya merupakan salah satu instrument yang dipakai sebagai tolak ukur dalam meningkatkan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat daerah. Mamesah (1995:16) mengemukakan bahwa keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum dimiliki/dikuasai oleh Negara atau daerah yang lebih tinggi serta pihak-pihak lain sesuai dengan ketentuan/peraturan perundang-undang yang berlaku. Supriatna (1996:174) menyatakan bahwa Keuangan Daerah adalah kemampuan pemerintah daerah untuk mengelola mulai dari merencanakan, melaksanakan, mengawasi, mengendalikan dan mengevaluasi berbagai sumber keuangan sesuai dengan kewenangan dalam rangka pelaksanaan asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas perbantuan di daerah yang diwujudkan dalam bentuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dari definisi tersebut dapat diambil dua unsur penting yaitu semua hak dimaksudkan sebagai hak untuk memungut pajak daerah, retribusi daerah dan penerimaan serta sumber-sumber lain sesuai

ketentuan yang berlaku merupakan penerimaan daerah sehingga menambah kekayaan daerah dan kewajiban daerah berupa kewajiban untuk membayar atau mengeluarkan uang sehubungan dengan adanya tagihan kepada daerah dalam rangka pembiayaan rumah tangga daerah serta pelaksanaan tugas umum dan tugas pembangunan oleh daerah.

Produk Domestik Regional Bruto

Laju pertumbuhan ekonomi diciptakan barang-barang dan jasa-jasa sebagai hasil kombinasi faktor-faktor produksi di berbagai sektor ekonomi masyarakat. Keseluruhan dari kegiatan ekonomi sektoral ini disebut sebagai struktur perekonomian. Salah satu alat ukur yang banyak digunakan untuk mengukur keseluruhan kegiatan ekonomi tersebut adalah perhitungan pendapatan nasional dan produk nasional. Untuk keperluan analisis biayanya digunakan konsep Produk Domestik Bruto atau PDB, yaitu barang-barang dan jasa-jasa yang belum dikoreksi dengan pendapatan bersih terhadap luar negeri dari faktor-faktor produksi. Dan di daerah konsep ini menjadi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), yaitu meliputi wilayah administrasi yang biasanya digunakan istilah pendapatan regional (Partadiredja, 1993: 37).

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang dihitung adalah merupakan jumlah nilai pertambahan yang dihasilkan atau diwujudkan oleh kegiatan ekonomi di berbagai sektor (lapangan usaha) suatu perekonomian dalam satu wilayah administrasi. (Sukirno, 1995 :475). Penggunaan kata-kata domestik adalah untuk menekankan bahwa nilai produksi yang diperoleh menggambarkan nilai seluruh produksi yang tercipta di dalam negeri, tanpa membedakan apakah produksi itu diciptakan oleh faktor produksi negara-negara lain yang digunakan oleh negara itu, seluruh faktor produksi mereka termasuk pendapatan nasional / regional.

Untuk mendapatkan nilai produk nasional bruto (GNP) dan produk domestik (GDP) maupun Produk Domestik Regional Bruto dipakai metode produksi, yaitu dengan menunjukkan produksi barang-barang dan jasa-jasa selama suatu periode tertentu, yang di Indonesia dalam perubahan tahun dasar 1983 ke 1993, klasifikasi sektor PDRB mengalami perubahan dari 11 sektor menjadi 9 sektor. Masing-masing ini dibagi ke dalam beberapa sub sektor. Pemecahan ekonomi dalam beberapa sektor dan sub sektor ini dimaksudkan untuk mengetahui sektor perekonomian dan kerja perekonomian serta hubungannya antara bagian-bagiannya. Klasifikasi sektor di dalam metode produksi didasarkan pada lapangan usaha. Pemecahan terkecil dalam perhitungan ini adalah unit-unit produksi seperti perusahaan perseorangan yang menghasilkan barang dan jasa. Adapun sumbangannya terhadap produksi adalah nilai tambah value added, yang merupakan hasil pengurangan nilai produksi bruto dengan bahan baku penolong.

Berdasarkan keterangan di atas maka selanjutnya dapat diperoleh definisi dari produk nasional bruto (GNP) serta produk domestik bruto (GDP). Produk domestik regional bruto adalah hasil perjumlahan dari semua barang-barang dan jasa-jasa akhir atau semua nilai tambah yang dihasilkan oleh warga suatu negara tertentu dan dalam jangka waktu tertentu, sedangkan produk domestik bruto adalah hasil produksi semua barang-barang dan jasa-jasa atau semua nilai tambah yang dihasilkan oleh suatu negara hasil produksi barang-barang dan jasa-jasa asing atau perusahaan asing (Sukirno,1995:18).

Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendapatan Asli Daerah terdiri dari: Hasil Pajak Daerah, Hasil Retribusi Daerah, Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Lain-lain Pendapatan Asli daerah yang sah.

Pajak daerah merupakan sumber penerimaan yang umumnya dilaksanakan oleh setiap negara yang menetapkan kebijaksanaan desentralisasi (otonomi daerah) yang biasanya ruang lingkup pajak ini ditentukan oleh pemerintah pusat, hal ini dapat dilihat sejauh mana penerapan kebijaksanaan desentralisasi yang tinggi cenderung akan memberikan sumber-sumber pendapatan yang cukup tinggi kepada daerahnya.

Menurut Dave (1988 : 63) dalam Mardiasmo (1997) berpendapat bahwa pajak daerah merupakan bagian dari sistem perpajakan nasional yang dalam otonomi daerah diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah sebagai salah satu sumber penerimaan pendapatan asli daerah. Sedangkan menurut Kunarjo (1996 : 37) dalam Mardiasmo (1997) menyatakan bahwa yang dimaksud dengan pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan daerah dan pembangunan daerah.

Wisatawan

Pariwisata merupakan bagian dari salah satu jenis industri baru yang mampu mempercepat peningkatan pertumbuhan ekonomi dan penyediaan lapangan kerja, peningkatan penghasilan dan standar hidup serta menstimulasi sektor-sektor produktif lainnya. Sektor pariwisata akan memberikan dampak bagi sektor-sektor yang lain. Banyak sekali manfaat yang dapat diambil dari pengembangan sektor pariwisata salah satunya adalah menggalang persatuan bangsa yang rakyatnya memiliki daerah yang berbeda, bahasa, adat istiadat dan cita rasa yang beraneka ragam pula. Meskipun tidak menutup kemungkinan dampak negative yang ditimbulkan dari adanya pariwisata.

Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata dijelaskan sebagai berikut:

1. Wisata adalah suatu kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi, dalam jangka waktu sementara.
2. Wisatawan adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan wisata. Wisatawan dapat berasal dari dalam negeri atau yang dikenal dengan sebutan wisatawan domestik dan adapula wisatawan yang berasal dari luar negara tujuan yang disebut wisatawan mancanegara (wisman).
3. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.
4. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha.

5. Daya tarik wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.

6. Daerah tujuan pariwisata yang selanjutnya disebut Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.

7. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.

8. Pengusaha Pariwisata adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha pariwisata.

METODE PENELITIAN

Definisi Operasional Variabel

Berikut ini didefinisikan secara operasional terkait dengan variabel penelitian sebagai berikut:

Pajak Hotel dan Restoran

Pajak hotel dan restoran adalah jumlah pajak yang diterima oleh pemerintah yang berasal dari hotel dan restoran di kota Samarinda yang dinyatakan dengan rupiah dalam periode 2003-2014.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Per Kapita

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Per Kapita merupakan pendapatan yang diterima oleh masing-masing per kepala penduduk. Pendapatan tersebut dihasilkan dengan membagi pendapatan regional/produk neto dengan jumlah penduduk per tahun, dinyatakan dalam rupiah per tahun dalam periode 2003-2014.

Jumlah Wisatawan

Jumlah Wisatawan adalah jumlah pengunjung yang datang ke Samarinda baik pengunjung domestik atau mancanegara yang dinyatakan dengan orang dalam periode 2003-2014.

Data Penelitian

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Kota Samarinda dan Dinas Pariwisata Kota Samarinda. Data yang diperlukan antara lain: Data mengenai perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Kota Samarinda tahun 2003–2014, Data mengenai Jumlah Wisatawan yang berkunjung di Kota Samarinda tahun 2003–2014, Data mengenai penerimaan Pajak Hotel dan Restoran Kota Samarinda 2003–2014.

Alat Analisis

Dalam melakukan pengujian hipotesis yang diajukan maka diperlukan analisis untuk membuktikan hipotesis yang diajukan. Adapun alat analisis yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda yaitu analisis yang digunakan untuk mengetahui hubungan antara variabel independen (X) dengan variabel dependen (Y). Dalam

penelitian ini variabel independen (X) adalah PDRB Per Kapita dan Jumlah Wisatawan sedangkan variabel dependen (Y) adalah Pajak hotel dan restoran di Samarinda. Dan untuk mengetahui kebenaran adanya pengaruh antara variabel X_1 dan X_2 terhadap variabel Y maka dipergunakan, uji F, uji T dan nilai koefisien determinan (R^2)

$$Y = b_0 + b_1 X_1 + b_2 X_2 + e \dots\dots \text{(Rangkuty, 2007 : 153)}$$

Dimana :

- Y = Ln Pajak Hotel dan Restoran
- b_0 = Konstanta
- X_1 = Ln PDRB Per Kapita
- X_2 = Ln Jumlah Wisatawan
- b_1, b_2 = Koefisien regresi
- e = Standart Error.

Koefisien korelasi digunakan untuk mengetahui kuatnya pengaruh antara variabel tidak bebas dengan variabel bebas atau untuk mengetahui bagaimana keeratan hubungan antara lima variabel bebas (X) secara bersama-sama dengan variabel tidak bebas (Y). Semakin besar nilai R, maka semakin tepat model regresi yang dipakai sebagai alat permainan karena total variasi dapat menjelaskan variabel tidak bebas (Ridwan, 2004; 248). Perhitungan koefisien determinasi digunakan untuk mengukur besarnya pengaruh antara dua variabel atau lebih. Semakin besar nilai R^2 , maka semakin besar pengaruh antara variabel yang tidak bebas dengan variabel bebas. R^2 ini mempunyai jangkauan antara 0 dan 1, semakin dekat ke 1 semakin besar proporsi variabel bebas tersebut menjelaskan variabel tidak bebas.

Uji F digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen secara bersama-sama mempunyai pengaruh yang berarti terhadap variabel dependen. Uji t digunakan menguji variabel tersebut satu per satu. Apabila variabel independen memiliki pengaruh terhadap variabel dependen, maka selanjutnya dapat dijelaskan variabel mana diantara variabel tersebut yang dominan berpengaruh terhadap variabel dependen. Pengujian secara parsial digunakan untuk menguji apakah setiap variabel independen mempunyai pengaruh atau tidak terhadap variabel dependennya.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Sebelum dilakukan analisis regresi liner berganda maka disajikan terlebih dahulu statistik deskripsi untuk masing-masing variabel penelitian. Berdasarkan hasil analisis deskripsi diperoleh hasil tingkat pendapatan Pajak Hotel dan Restoran Kota Samarinda rata-rata mencapai 16,7 milyar untuk periode 2003-2014. Sedangkan untuk variabel PDRB per kapita rata-rata mencapai 36,6 juta rupiah dan Jumlah wisatawan sebanyak 1,02 juta wisatawan rata-rata selama periode 2003-2014.

Tabel 3. Statistik Deskripsi Variabel Penelitian

	Minimum	Maximum	Rata-Rata	Std. Dev.
PDRBperkapita	17,481,542	56,560,620	36,640,901.75	15,030,349.93
JumlahWisatawan	782,052	1,298,873.	1,021,356.75	205,638.63
PHR	3,989.22	46,101.00	16,703.81	13,375.27

Sumber: data diolah, 2016

Dari hasil perhitungan koefisien korelasi diperoleh hubungan yang sangat kuat antara variabel PDRB Per Kapita dan Jumlah Wisatawan terhadap Pajak hotel dan restoran di Samarinda. Sedangkan hasil dari koefisien determinasi nilai R² (R square) dapat diartikan bahwa sekitar 0,930 atau 93 persen variabel yang mempengaruhi pajak hotel dan restoran adalah variabel PDRB Per Kapita dan Jumlah Wisatawan sedangkan sisanya 7% kemungkinan dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak termasuk dalam model penelitian ini. Selanjutnya untuk mengetahui bahwa ada atau tidaknya pengaruh antara variabel independen (PDRB Per Kapita dan Jumlah Wisatawan) terhadap pajak hotel dan restoran, maka dapat dilakukan pengujian secara serempak dan simultan dengan cara membandingkan nilai F_{hitung} dengan F_{Tabel} dengan derajat kesalahan yang digunakan adalah 5%. Dari perhitungan F_{hitung} diperoleh nilai sebesar 59.662 dan nilai signifikansi 0,000. hal ini dapat menunjukkan bahwa variabel independen (PDRB Per Kapita dan Jumlah Wisatawan) secara bersama-sama berpengaruh terhadap Pajak Hotel dan Restoran di Samarinda.

Tabel 2. Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.964a	.930	.914	.22763

a. Predictors: (Constant), JumlahWisatawan, PDRBperkapita

Sumber: Data Sekunder diolah, 2016

Tabel 3. Anova

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	6.183	2	3.091	59.662	.000
	Residual	.466	9	.052		
	Total	6.649	11			

a. Dependent Variable: PHR

b. Predictors: (Constant), JumlahWisatawan, PDRBperkapita

Sumber: Data Sekunder diolah, 2016

Tabel 4. Coefficients

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-28.271	6.030		-4.689	.001
	PDRBperkapita	1.179	.419	.650	2.816	.020
	JumlahWisatawan	1.251	.873	.331	1.433	.186

a. Dependent Variable: PHR

Sumber: Data Sekunder diolah, 2016

Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui apakah variabel independen PDRB Per Kapita dan Jumlah Wisatawan secara individu atau parsial berpengaruh terhadap variabel dependen yaitu Pajak hotel dan restoran di Samarinda. Dengan menggunakan tingkat signifikansi 0,05 ($\alpha=5\%$) dan derajat kepercayaan 95%. Dari pengolahan data diperoleh nilai t – hitung dari variabel independen adalah sebagai berikut: Pada variabel PDRB Per Kapita (X_1) diketahui memiliki nilai koefisien sebesar 1,179 dengan nilai signifikansi sebesar 0,020 sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel PDRB Per Kapita (X_1) berpengaruh positif dan signifikan terhadap pajak hotel dan restoran di Samarinda (Y). Sedangkan untuk variabel Jumlah Wisatawan (X_2) diketahui memiliki nilai koefisien sebesar 1,251 dengan nilai signifikansi sebesar 0,186 sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel jumlah wisatawan (X_2) berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap pajak hotel dan restoran di Samarinda (Y).

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat diketahui bahwa hanya variabel PDRB per kapita yang memiliki dampak signifikan terhadap pajak hotel dan restoran sedangkan bertambahnya jumlah wisatawan tidak berdampak signifikan terhadap peningkatan pajak hotel dan restoran di Kota Samarinda. Ini menandakan jumlah wisatawan yang berkunjung di Kota Samarinda tidak meningkatkan pendapatan pajak hotel dan restoran.

KESIMPULAN DAN IMPLIKASI

Berdasarkan hasil dan pembahasan dan dibuat simpulan bahwa variabel PDRB Per Kapita (X_1) berpengaruh positif dan signifikan terhadap pajak hotel dan restoran di Samarinda (Y). Sedangkan untuk variabel Jumlah Wisatawan (X_2) berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap pajak hotel dan restoran di Samarinda (Y). Ini menandakan jumlah wisatawan yang berkunjung di Kota Samarinda tidak meningkatkan pendapatan pajak hotel dan restoran. Untuk itu, pemerintah daerah perlu meningkatkan pendapatan pajak melalui jumlah wisatawan yang berkunjung.

DAFTAR PUSTAKA

- Mamesah, D, J. (1995). *Sistem Administrasi Keuangan Daerah*. Pustaka. Jakarta
- Mardiasmo, (1997), *Perpajakan*, Andi Ofset, Yogyakarta
- Partedireja, Ace, (1993), *Pengantar Ekonomika*, Badan Penerbitan Fakultas Ekonomi, Yogyakarta
- Pemerintah Republik Indonesia. 2004. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004, Tentang Perimbangan Pusat dan Daerah Tahun 2000. Jakarta.
- Pemerintah Republik Indonesia.2009. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009, Tentang Pajak dan Retribusi Daerah. Jakarta.
- Rangkuti, Fredy, (2007), *Riset Pemasaran*, Cetakan Keenam, Penerbit Gramedia, Jakarta.
- Ridwan, (2003), *Dasar – Dasar Statistika*, Alfabeta, Bandung.
- Sukirno. Sadono, (1995), *Pengantar Teori Makro Ekonomi*, Penerbit Bina Grafika, Jakarta
- Supriatna, Tjahya, (1996), *Administrasi Birokrasi dan Pelayanan Publik*, Nimas Multima, Jakarta